

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENGINISIASI PEMBENTUKAN ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) TAHUN 2017

Komang Triana Wulandari¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Penny Kurnia Putri³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: trianawulaan@gmail.com ¹⁾, sukmasushanti@gmail.com ²⁾, penny.tjokrodihardjo@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesia's interests in initiating the ASEAN Outlook on Indo-Pacific in fulfilling Indonesia's grand strategy to become the world's maritime axis using qualitative methods. Regional geopolitical changes that have created a desire for countries to take part in Asia, including the United States and China with various cooperation formed to meet their respective interests. Indonesia on the other hand sees the country's potential as a strong maritime axis with adequate natural resources and strategic geographic potential in the Indo-Pacific region. However, Indonesia's desire is considered to be releasing ASEAN as one of the organizations in the region which is also a forum for Indonesia's foreign policy so far. Indonesia's desire to continue to spread its wings in the international arena without leaving ASEAN as a regional organization creates dynamics that trigger new ideas that are seen by Indonesia as a way to achieve its interests.

Kata Kunci : Indonesia, ASEAN, Indo-Pacific, National Interest, ASEAN Outlook

1.2 PENDAHULUAN

Indo-Pasifik merupakan konsep geografis yang membentangi wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan ini menjadi kawasan yang paling dinamis dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan belahan dunia lainnya (Montratama, 2016: 36). Selain itu, pertumbuhan dan mobilitas laut yang berkembang pesat menjadikan kawasan ini memiliki rute laut yang paling penting di dunia, sehingga Indo-Pasifik dikatakan sebagai pusat perekonomian dan politik dunia. Kawasan Indo-Pasifik ini mencakup Australia, menelusuri pantai timur Afrika, sebagian besar kawasan Asia Timur, Asia

Tenggara, Selandia Baru, dan berakhir di Hawaii (Antara News, 20/12/2018).

Dikatakan sebagai kawasan tersibuk, Indo-Pasifik memiliki peranan tersendiri di mata setiap negara. Hal ini dikarenakan, kawasan Indo-Pasifik memperoleh perhatian khusus dari negara-negara besar, seperti Tiongkok, Amerika Serikat (AS), India, dan Australia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan tersebut tergolong pesat. Kebijakan serta kerja sama yang muncul di kawasan ini, turut mempengaruhi Asia Tenggara sebagai kawasan yang termasuk di dalam Indo-Pasifik. Pengaruh ini terasa di Asia Tenggara dikarenakan beberapa jalur perdagangan internasional juga melewati kawasan Asia Tenggara, lebih

tepatnya melewati selat yang ada di Indonesia.

Terdapat 40% dari total 90% jalur perdagangan melewati perairan Indonesia (Dephub, 2/3/2018). Keuntungan ini bisa memberikan peluang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran maritim dunia (ITB, 1/11/2014). Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap wilayah laut yang memberikan Indonesia sebuah kuasa untuk mengelola segala sumber daya alam yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, serta memberikan keuntungan bagi Indonesia tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga politik. Kedaulatan yang dimiliki Indonesia juga dapat membantu untuk mempertahankan jalur perdagangan ini sebagai laut wilayah, sehingga Indonesia memiliki potensi lebih besar untuk turut mengatur jalur perdagangan yang ada. Contohnya, pada Selat Malaka. Selat ini merupakan salah satu jalur paling ramai diantara tiga selat lainnya. Hal ini dikarenakan Selat Malaka memiliki jarak tempuh yang lebih pendek, sehingga lebih menguntungkan dalam biaya transportasi (Panduwinata, 2016: 278).

Keuntungan ini memberikan Indonesia ruang untuk lebih banyak mengikuti kerja sama yang ada dikawasan seperti: *Indian Ocean Rim Association* (IORA); *Regional Maritime Security Initiative* (RMSI); *ASEAN Maritime Forum* (AMF);

Malacca Straits Council (MSC); *Our Ocean Conference* (OOC). Kerja sama di kawasan Indo-Pasifik dilakukan oleh sebagian besar negara yang berada di sekitar kawasan, tak terkecuali Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan gagasan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), yang dilihat berdasarkan potensi di kawasan regionalnya. Konsep AOIP ini pertama kali digagas oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalewaga pada tahun 2013, yang kemudian dikembangkan kembali tahun 2017. Gagasan mengenai AOIP secara umum disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India tahun 2018 (CNN Indonesia, 26/01/2018). Konsep AOIP yang digagas oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap tantangan yang berkembang dan berasal dari kawasan eksternal ASEAN. Dalam pemaparan konsep yang diajukan Indonesia, ASEAN dijelaskan sebagai organisasi sentral yang selama ini berada di kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia.

Sebagai organisasi sentral, ASEAN selama ini telah berperan dalam menjaga stabilitas dan dinamika yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, wilayah Asia Pasifik dan Samudra Hindia mengalami perubahan secara geopolitik maupun geostrategis. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini juga memicu adanya keuntungan dan

tentunya tantangan bagi kawasan. Pemerintah Indonesia juga menjelaskan tentang bagaimana tatanan dunia yang mulai berubah ini dapat mengancam keutuhan dan kesatuan ASEAN, sehingga perlu adanya *platform* untuk kawasan regional Asia Tenggara agar konflik perihal kedaulatan di luar kawasan dapat dikurangi (Roza, 2019: 10).

Setelah melalui berbagai macam perundingan, Pemerintah Indonesia berhasil melobi kesembilan negara anggota ASEAN. Gagasan ini disetujui oleh seluruh anggota ASEAN dan didukung oleh AS, Jepang, dan Australia sebagai negara mitra wicara ASEAN, dengan empat bidang kerja sama yang dirumuskan oleh Indonesia, yakni: kerja sama maritim, konektivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan terakhir kerja sama ekonomi lainnya. Gagasan ini juga akan menentukan arah kerja sama antarnegara ASEAN dengan kawasan lainnya. Selain itu, gagasan AOIP akan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam merespon berbagai tekanan yang mungkin muncul untuk mendukung atau menjauh dari proposal Indo-Pasifik lainnya, seperti gagasan yang dimiliki Tiongkok dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) maupun Amerika Serikat dengan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Terlepas dari kepiawaian Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan negara anggota ASEAN dalam gagasan AOIP penelitian ini ingin menganalisis lebih lanjut mengenai apa kepentingan Indonesia dalam menginisiasi

pembentukan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP)?

1. KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka. Literatur pertama adalah jurnal yang berjudul "*Jokowi's Maritim Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific*". Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Bagus Dharma Agastia dan A. A. Banyu Perwita tahun 2015 ini menjelaskan tentang doktrin dari visi Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Jokowi, serta perubahan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik sehingga turut mengubah politik luar negeri dan pertahanan Indonesia. Perubahan ini menyebabkan kawasan Indo-Pasifik menjadi tidak dapat diprediksi, hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya kekuatan militer negara-negara besar dan juga sengketa kawasan yang terjadi antarnegara anggota ASEAN dan dengan negara lain. Disisi lain, Amerika Serikat juga mulai memperhatikan kawasan ini dengan bertujuan untuk melakukan *re-branding* di Asia Tenggara. Mereka juga menjelaskan tentang poros maritim dunia yang digagas Jokowi sejatinya menunjukkan posisi geopolitik Indonesia sebagai negara maritim di kawasan regional, serta Jokowi ingin menguatkan diplomasi maritimnya sehingga posisi Indonesia tidak hanya kuat dalam *hard power* namun juga dalam *soft power*-nya.

Jurnal ini akan membantu penelitian dalam menjelaskan serta menunjukkan

langkah yang digunakan Indonesia untuk mencapai poros maritim dunia. Kondisi geografis yang strategis bagi Indonesia ini juga mengharuskan Indonesia untuk tidak memihak kedua kekuatan besar yang sedang mefokuskan kebijakannya pada Indo-Pasifik. Dengan bantuan ASEAN, Indonesia ingin memainkan peran sentralnya di kawasan sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana Indonesia kerap menjadikan ASEAN sebagai badan atau batu pijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Namun, jurnal ini belum dapat membantu penelitian untuk menjelaskan negara dalam mengambil langkah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Maka dari itu peneliti menambahkan jurnal kedua yang menjelaskan strategi PMD Indonesia dengan lebih strategis.

Literatur kedua yang digunakan adalah jurnal yang berjudul "*Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik*". Jurnal ini ditulis oleh Yanyan M. Yani dan Ian Monratama pada tahun 2015. Penulis jurnal mencoba membahas mengenai Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai strategi geopolitik Indonesia secara lebih terperinci. Yani & Monratama menjelaskan asal usul orientasi kebijakan luar negeri Indonesia ke PMD merupakan hal yang tepat. Hal ini dikarenakan, selain kerja sama yang sedang dibangun oleh negara-negara sekitar, kepentingan yang diperebutkan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik adalah

rute pelayaran, akses pasar internasional, dan akses ke sumber daya kawasan.

Hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia, penuli menjelaskan peran yang sepatutnya dimainkan oleh Indonesia dalam kondisi ini. Menurut penulis, *alignment* atau gerakan blok merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan dalam realitas politik suatu negara. Negara bisa saja tidak hanya membentuk aliansi, namun juga *alignment* untuk membantu membangun ekonomi dan keamanan negara. Dalam hal ini, Indonesia juga perlu melakukan hal yang sama. Dalam kondisi dua kekuatan besar yang sedang berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik ini, bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk membangun kemitraan dengan keduanya. Hal ini didukung oleh penjelasan penulis tentang sudut pandang Indonesia yang harus lebih mengarah ke luar (*outward looking*).

Jurnal ini dapat membantu peneliti untuk menjelaskan upaya mencapai visi PMD ini. Indonesia harus dapat melihat keluar negaranya untuk mencoba memahami geopolitik yang ada di kawasan Indo-Pasifik itu sendiri. Selain itu, jurnal ini juga dapat membantu menjelaskan pilar-pilar PMD secara lebih rinci untuk kemudian dikaitkan dengan empat kesepakatan dari *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* yang digagas oleh Indonesia. Penelitian ini secara lebih lanjut akan memberikan perspektif baru untuk menganalisis kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia dengan melihat nilai-nilai yang terdapat dalam kepentingan nasionalnya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam membahas rumusan masalah. Menurut Septiawan (2010) menjelaskan sifat deskriptif merupakan teknik menulis alur pembahasan dengan cara menggambarkan permasalahan dan analisis secara rinci. Dapat dilakukan dengan pemberian definisi, menyajikan asal usul permasalahan (historis), serta dapat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Hasan (2002) berpendapat bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian pada sumber-sumber yang telah ada. Sumber data yang digunakan oleh peneliti berasal dari sumber berita, situs-situs pemerintah, serta jurnal maupun literatur yang relevan dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal karya Yanyan M. Yani dan Ian Montratama (2015) dengan judul *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik* yang memberikan gambaran mengenai keadaan Indo-Pasifik serta peranan ASEAN. Serta jurnal-jurnal lainnya terkait peran Indonesia, tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam kawasan ini, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian. Data yang disediakan didukung oleh data-data yang berasal dari situs berita daring. Peneliti juga

menggunakan situs pemerintah seperti situs Kementerian Luar Negeri Indonesia maupun situs Sekretariat Kabinet RI dalam mengumpulkan data mengenai kepentingan maritim Indonesia dalam konsep yang di gagas untuk *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kepentingan Indonesia dalam Gagasan AOIP

Setelah kurang lebih dua tahun, Indonesia berhasil mengawal inisiasi kerangka kerja sama AOIP yang pada akhirnya disetujui dan dibentuk tahun 2019. Gagasan AOIP yang disusun oleh Indonesia memiliki karakter yang kuat dalam menggambarkan kawasan regionalnya. Tanpa menghilangkan sentralitas ASEAN, Indonesia menggagas *Outlook* ini untuk dapat digunakan oleh ASEAN secara umum dan Indonesia secara khususnya. Hal ini berkaitan dengan posisi ASEAN di Indonesia. Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas aktif ini menjadikan ASEAN sebagai landasan penting di dalam politik luar negerinya, sehingga Indonesia bisa memajukan kepentingan nasionalnya lewat ASEAN (Agastia&Perwita, 2015: 33).

Indonesia melihat peluang yang ada di kawasan ASEAN sebagai ruang yang dapat membantu Indonesia dalam memperluas cakupan kerjanya. Keberhasilan Indonesia membawa isu

maritim dalam agenda ASEAN juga merupakan langkah awal yang membantu Indonesia membuka jalan demi mencapai PMD. Isu maritim bagi Indonesia saat ini merupakan ancaman yang memberikan dampak pada aspek penting terkait permasalahan yang mengancam ekonomi, pertahanan dan keamanan Indonesia seperti permasalahan perbatasan, isu perompak dan *illegal fishing*, serta perubahan geopolitik yang mengancam sentralitas kawasan menjadi skala utama dalam pemetaan kepentingan Indonesia yang digagas sebagai PMD (Anwar, 2020: 113). Dalam pemenuhan visi PMD ini, Indonesia lebih banyak melihat kerja sama dan pemanfaatan kekuatan di dalam negeri (*inward looking*), sehingga semua fokus kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi ini mengarah ke pembenahan infrastruktur serta pembangunan tol dan pelabuhan baru di dalam negeri saja. Sementara pembangunan dalam negeri masih berjalan, kasus yang berada di luar perbatasan Indonesia menarik minat pemerintah. Ancaman-ancaman yang hadir di tengah perubahan geopolitik ini kembali memberikan Pemerintah Indonesia sebuah ruang berpikir untuk menggagas konsep yang berhubungan dengan luar perbatasan Indonesia yang dalam hal ini termasuk kawasan regional Indonesia.

Pada pemerintahan Jokowi kebijakan luar negeri yang dianut oleh Indonesia memiliki perbedaan dari era sebelumnya. Melihat dari visi yang diumumkan Jokowi pada awal pemerintahannya mengenai

pembentukan Indonesia menjadi PMD, memiliki dampak pada kebijakan luar negerinya. Indonesia selama ini memiliki karakter pemimpin tersendiri dalam memetakan kepentingan nasionalnya. Namun, kebijakan luar negeri Indonesia tetap pada perilaku 'bebas aktif'. Pada setiap pemerintahan, cakupan bebas aktif ini memiliki skala yang berbeda. Jokowi saat ini memaknai bebas aktif tidak hanya pada cakupan regional ASEAN. Ia mengambil Indo-Pasifik sebagai cakupan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan, Jokowi menginginkan Indonesia masih memetakan kepentingan di kawasan ASEAN, di saat yang bersamaan juga memperluas kepentingannya ke ranah global (Scott, 2019: 3)

Platform ASEAN selama ini memang dikenal sebagai referensi kebijakan luar negeri Indonesia serta menjadi penentu pemetaan kepentingan nasional Indonesia (Agastia&Perwita, 2015: 33). Tidak jarang Indonesia membuat kebijakan yang mengikutsertakan ASEAN dalam pencapaiannya. Dalam hal ini, pembentukan AOIP merupakan jembatan bagi Indonesia untuk menegaskan kondisi di kawasan. Selain untuk memberikan kuasa terhadap ASEAN sebagai wadah kerja sama di Asia Tenggara, serta menjaga stabilitas di kawasan. Indonesia memiliki kepentingan yang juga harus dicapai dengan menggunakan AOIP ini nah kerja sama, berkorelasi dengan PMD yang ingin dicapai oleh Indonesia, yang kemudian memberikan

Indonesia pandangan dan sikap lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya di luar perbatasan Indonesia (*outward looking*) (Yani&Montratama, 2015: 36).

4.2 AOIP dalam Intensitas Kepentingan Indonesia

Kebijakan luar negeri suatu negara menurut Nuechterlein merupakan suatu jalan mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk memetakan kepentingan nasional, suatu negara memiliki tingkatan, intensitas, dan nilai yang berbeda untuk memroyeksikan skala prioritas kepentingan negara itu sendiri. Dalam hal pemetaan kepentingan Indonesia, Jokowi memulai pemetaan pada bidang pembangunan nasional serta mengumumkan visi Poros Maritim dengan *grand strategy* yang dinamakan Nawacita sebagai pembentukan kebijakan luar negeri serta pemenuhan kepentingan Indonesia. Melihat pemetaan kepentingan Indonesia ke arah maritim, berdasarkan pembagian kepentingan oleh Nuechterlein, intensitas minat yang memicu kepentingan Indonesia menjadi negara maritim adalah pada permasalahan *major*.

Hal ini dikarenakan dalam kondisi *major*, suatu negara dihadapkan pada permasalahan perbatasan di luar negara yang berdampak pada faktor ekonomi, politik, dan ideologi suatu negara (Nuechterlein, 1976: 250). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemetaan kepentingan Indonesia dalam menjadikan negara sebagai poros maritim merupakan respon dari keadaan luar negara

yang berpengaruh dan berdampak pada keadaan di dalamnya, yakni perubahan geopolitik. Pada isu *major*, untuk meredakan permasalahan yang ada di suatu negara biasanya menggunakan diplomasi dan bernegosiasi. Kebijakan PMD memiliki diplomasi maritim yang merupakan salah satu langkah Indonesia untuk mencapai kepentingannya. Indonesia dalam kasus ini, menggunakan posisi tawarnya untuk membentuk kerja sama dan juga respon sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam menyikapi perebutan kepentingan antara AS dan Tiongkok yang berdampak pada kawasan regional. Respon ini berupa pengagasan AOIP yang termasuk dalam skala prioritas Indonesia dalam memetakan kepentingan nasionalnya.

4.2.1 Kepentingan Ekonomi Indonesia dalam Gagasan AOIP

Salah satu pembagian kepentingan oleh Nuechterlein adalah kepentingan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dan hubungan dengan negara lain. Indonesia membawa konsep Indo-Pasifik ke dalam kepentingannya untuk menjadi poros maritim. Kepentingan ini memerlukan cakupan yang luas agar Indonesia memiliki kendali yang lebih besar dalam mengelola kebijakan luar negerinya (Rosyidin, 2019: 8-9). Pada visi poros maritim, Jokowi memetakan ekonomi maritim sebagai salah satu pengembangan infrastruktur yakni tol laut. Hal ini dilakukan

untuk membantu meningkatkan kapasitas pelayaran agar efektifitas proses ekonomi dapat bertambah. Hal ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat jalur perdagangan dunia.

Dalam memenuhi kepentingan ini Indonesia tidak hanya perlu membenahi infrastruktur di dalam negeri, namun perlu juga pembenahan dalam keamanan untuk dapat menjamin pelayaran yang ada di perairan Indonesia tidak mengalami ancaman. Nawacita Jokowi menginginkan Indonesia yang berperan lebih dalam kawasan regional dan *Indo-Pacific* dikarenakan, kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penggagasan AOIP oleh Indonesia. Pada penjabaran Nuechterlein tentang proyeksi kepentingan suatu negara, terdapat nilai yang turut diperhitungkan dalam merumuskan kepentingan negara di luar perbatasannya. Dalam hal ini, Indonesia mendasari kepentingan nasionalnya dengan nilai *economic stake* yang mengondisikan kepentingan suatu negara terhadap perdagangan dan investasi di negara tersebut. Hal ini terlihat dalam visi ekonomi maritim oleh Jokowi yang ada dalam PMD yang ingin membangkitkan perekonomian Indonesia berbasis maritim. Keinginan ini menumbuhkan kebijakan Jokowi yang membangun tol laut untuk memperbaiki infrastruktur kelautannya. Namun, kepentingan tersebut hanya melingkupi ruang domestik Indonesia saja. Sehingga,

perluasan kebijakan Jokowi melalui kebijakan luar negerinya di ASEAN adalah dengan membentuk AOIP yang juga memiliki kepentingan ekonomi di dalamnya.

Pada kerangka kerja sama AOIP Indonesia memasukkan kepentingan ekonomi yang ingin dicapainya. Pada bidang ekonomi, Indonesia telah mengikuti kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, terbentuknya MEA juga belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN. Bahkan ketika pertumbuhan Indonesia membaik di tahun 2016 Indonesia masih dikalahkan oleh Filipina dan Vietnam (databoks, 4/8/2016). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 sebesar 5,1% yang lebih tinggi di banding tahun 2017, cukup melegakan bagi Pemerintah Indonesia. Tetapi, di tengah membaiknya ekonomi Indonesia, perekonomian global juga tetap meningkat, terutama pada bidang investasi di negara-negara besar seperti AS, Tiongkok, dan juga India, bahkan pertumbuhan investasi di AS meningkat hingga 7,3% (Bappenas, 2018: 4-5). Isu perekonomian di Indonesia memang tidak bisa diselesaikan secara langsung ketika Indonesia memilih bekerja sama dengan negara-negara lain.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi maupun investasinya dipengaruhi oleh permasalahan domestik yang ada di Indonesia. Saat ini dengan kerja sama yang akan terbentuk ketika disetujuinya AOIP akan memberikan Indonesia bantuan pada pemenuhan investasi untuk keberlanjutan

pembangunan di Indonesia itu sendiri. Sehingga, permasalahan infrastruktur laut yang digunakan Indonesia sebagai alat untuk perkembangan ekonomi diharapkan bisa berkembang. Selain itu juga, Indonesia memiliki ASEAN untuk tetap menjaga hubungan luar negerinya sehingga menumbuhkan investasi di Indonesia akan lebih mudah.

4.2.2 Kepentingan Pertahanan Indonesia dalam Gagasan AOIP

Memroyeksikan kepentingan ekonomi berarti juga memroyeksikan kepentingan keamanan suatu negara. Hal ini dikarenakan aspek ekonomi dan keamanan merupakan paradigma yang sepatutnya saling mendukung keberadaan satu sama lain (Al Syahrin, 2018: 2-3). Seperti pembangunan tol laut yang ditujukan untuk memperlancar perekonomian domestik Indonesia harus didukung dengan keamanan laut yang nantinya akan menjamin bahwa perjalanan kapal-kapal dagang di perairan Indonesia tidak akan terganggu oleh kapal dagang asing dan perompak.

Dalam visi PMD terdapat diplomasi dan keamanan maritim yang merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi isu di perbatasan maupun luar perbatasan lautnya. Diplomasi maritim mengarah pada penyelesaian masalah di luar perbatasan menggunakan *soft power*, sedangkan keamanan maritim merupakan penyelesaian

masalah dengan *hard power*. Pada pemerintahan Jokowi, kebijakan mengenai pertahanan laut difokuskan pada empat bidang yakni, menjamin kebutuhan pertahanan yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista (alat utama sistem pertahanan); Kemandirian pertahanan demi mengurangi ketergantungan pasokan produk impor; membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani; dan menempatkan pertahanan dan keamanan negara dengan komprehensif sebagai bagian integral (CNN, 31/12/2014). Untuk memperluas cakupan penyelesaian permasalahan keamanan laut ini, Indonesia memasukkan agenda keamanan maritim dalam kerja sama AOIP.

Keamanan maritim Indonesia dalam proyeksi kepentingan Nuechterlein, mengarah pada nilai *proximity of the danger*. Suatu negara mengutamakan kepentingan keamanan dan pertahanan dikarenakan rasa aman suatu bangsa akan dipengaruhi dengan jarak ancaman dari perbatasan negara tersebut. Hal ini menunjukkan Indonesia dalam memetakan kepentingannya di PMD mengarah pada jarak ancaman perbatasan dalam isu keamanan laut yang ada di Indonesia dapat sangat mengancam masyarakat dan mempengaruhi perekonomian serta ranah lainnya. Dibuktikan dengan isu perompakan yang kerap terjadi di perairan Indonesia, keinginan atas penyelesaian yang tidak melibatkan intervensi asing mengakibatkan kerugian bagi Indonesia dan kesejahteraan nelayan di

perairan Indonesia (Laksmana et al., 2011: 8) Ditambah dengan adanya permasalahan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing menambah beban masyarakat dan nelayan serta kerugian yang harus dihadapi Indonesia mencapai triliun rupiah (Tempo, 29/6/2014).

Dalam hal ini, Indonesia juga menyisipkan keinginan dan kepentingan nasionalnya untuk mengatasi isu perbatasan dan keamanan maritim yang masih menjadi permasalahan di perairan Indonesia. Hadirnya Tiongkok dengan BRI yang merupakan ambisi pembangunan jalur perdagangan baru Tiongkok, mengancam posisi Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam penjelasan bab sebelumnya, pada peta Tiongkok yang memetakan jalur maritim dan perdagangannya akan bersinggungan dengan Pulau Natuna. Permasalahan terletak pada semakin terbukanya jalan bagi Tiongkok ketika dapat melewati kepulauan Natuna yang meski dalam *United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS)* 1982 adalah milik Indonesia. Namun kerap kali terdapat aktivitas ilegal yang dilakukan Tiongkok di perairan Natuna tersebut (Wibawati et al., 2018:115). Inilah yang menginisiasi keinginan Indonesia untuk bekerja sama dengan ASEAN lewat AOIP. Indonesia menginginkan keamanan yang lebih kongkrit dengan kerja sama yang jelas dan memiliki payung hukum.

4.2.3 Kepentingan Tantanan Dunia Indonesia dalam Perubaham Geopolitik di Kawasan

Kepentingan yang selanjutnya terlihat dari peng gagasan AOIP ini adalah tatanan dunia (*world order*). Menurut Nuechterlein, kepentingan tatanan dunia adalah pemeliharaan dalam sistem politik dan ekonomi internasional yang menjamin keamanan warga negara dan perdagangan dapat beroperasi di luar perbatasan negara. Selain menyelesaikan permasalahan ekonomi dan pertahanan keamanan maritim, Indonesia perlu menjaga sistem politiknya dengan negara-negara di kawasan serta kedua negara besar yang turut berperan di kawasan Asia Pasifik (Montratama, 2016: 40). Hubungan yang terbentuk antara Indonesia dengan Tiongkok melalui perjanjian perdagangan maupun kerja sama investasi, serta banyak kerja sama teknologi yang dikembangkan berasal dari Tiongkok mengharuskan Indonesia tetap menjaga batas aman dalam kerja sama dan hubungan dengan mitranya tersebut (Montratama, 2016: 42).

Tidak hanya hubungan dengan Tiongkok, masuknya AS dalam kawasan Asia Pasifik juga memberikan keuntungan serta tantangan bagi Indonesia. Jika hubungan dengan Tiongkok adalah bekerja sama dalam bidang ekonomi, maka Indonesia bekerja sama dengan AS pada bidang militer dan pertahanan. Banyaknya kerja sama yang terjalin antara negara-negara anggota ASEAN dengan AS, membuat Indonesia berpikir dua kali untuk menjaga jarak dengan AS. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang

lebih strategis berada ditengah-tengah Indo-Pasifik dapat lebih menguntungkan jika ikut dalam kerja sama keamanan yang terjalin oleh AS dan negara-negara tetangga.

Dalam posisi ini, jika dilihat dalam nilai kepentingan Nuechterlein, pemetaan kepentingan Indonesia ini dikarenakan oleh *effect on balance of power*, yang menjelaskan mengenai kepentingan nasional suatu negara terkait keamanan dan tatanan dunia yang dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di negara-negara belahan dunia. Kondisi tidak hanya memengaruhi keamanan, namun juga perekonomian suatu negara. Neuchterlein menjelaskan *effect on balance of power* ini adalah kondisi suatu negara yang ingin mengimbangi kekuatan negara lainnya. Saat ini dalam kawasan Indo-Pasifik, dua kekuatan besar yang sedang berada dalam perebutan hegemoni di kawasan adalah Tiongkok dan AS. Indonesia melihat dalam kepentingan nasionalnya kedua negara tersebut saling menguntungkan untuk bekerja sama di kawasan. Hal ini juga dapat menjadi titik tumpu Indonesia untuk berdiri, sehingga kepentingan nasional Indonesia dapat berkembang di kawasan Indo-Pasifik tanpa meninggalkan ASEAN sebagai kebijakan luar negeri Indonesia (Agastia&Perwita, 2015: 37).

Selain ketiga kepentingan yang utama dalam peng gagasan AOIP dan kepentingan Indonesia, ada juga hal yang menambah keinginan Indonesia dalam meng gagasan AOIP selain untuk bekerja sama dengan ASEAN yakni dengan menjalankan

grand strategy Nawacita Jokowi. Keinginan Jokowi dalam menjadikan ASEAN tetap sebagai pemegang sentralitas kawasan regional juga memengaruhi Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN secara tidak langsung. Keberhasilan Indonesia dalam meng gagasan AOIP hingga dicapainya kesepakatan untuk meresmikan dokumen tersebut, menunjukkan status pemimpin alami ASEAN masih melekat di Indonesia. Keinginan Jokowi dalam Nawacita untuk memperluas kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga dapat dikatakan berhasil tercapai.

Dalam nilai pemetaan kepentingan Nuechterlein, hal ini mengacu pada nilai *national prestige* yang memetakan kepentingan nasional untuk memperlihatkan kebijakan dalam suatu negara terhadap negara lain dengan menunjukkan kredibilitas di negara tersebut, sehingga dapat dipercaya dan dianggap. Keberhasilan meyakinkan anggota ASEAN dengan konsep AOIP, Indonesia mengharapkan kerja sama yang juga bisa terbentuk untuk melancarkan kepentingan nasional PMD-nya. Indonesia ingin mencapai kepentingan nasionalnya, merentangkan sayap untuk masuk di kancah internasional tanpa menghilangkan kepercayaan negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama di kawasan dengan kesan meninggalkan ASEAN sebagai sentralitas dan mitra multilateral Indonesia.

4.3 Proyeksi Tantangan Indonesia dalam Membawa PMD di Indo-Pasifik

Disetujuinya AOIP dalam KTT ASEAN merupakan bukti dari keberhasilan Indonesia dalam membawa isu maritim di kawasan. Tetapi, tujuan dari dibentuknya AOIP itu sendiri tidak hanya untuk menetapkan ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan Asia Tenggara, namun juga Indonesia ingin membawa kepentingan nasionalnya masuk dalam isu kawasan tersebut. Namun, hal ini akan sulit dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan AOIP saat ini merupakan bentuk norma yang menyediakan aturan serta prinsip kerangka kerja sama dengan gagasan yang masih baru dan tidak memiliki posisi yang kuat, dapat dengan mudah tergantikan dengan tawaran kerja sama yang lebih besar potensinya di kawasan.

Norma memang merupakan hal penting dalam suatu hubungan antar negara. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah Indonesia tidak bisa berpegang hanya pada kerangka kerja sama AOIP, karena dalam menjalankan sebuah kerja sama, suatu negara tidak dapat berpegang hanya pada norma dari kesepakatan tersebut. Hal ini dikarenakan norma yang ada tidak dapat mengatur sikap negara, terutama negara-negara dengan pengaruh besar, seperti AS dan Tiongkok untuk berperilaku satu sama lain (Sukma, 2019: 6).

Hadirnya aktor lain seperti Tiongkok yang jalur perdagangan yang sedang

dibangun untuk dapat menjadi alternatif lain juga menjadi tantangan yang cukup kuat bagi Indonesia. Terlebih dengan masih minimnya keamanan dan pertahanan laut yang dimiliki Indonesia sendiri dengan banyaknya permasalahan di luar kawasan Indonesia termasuk permasalahan perbatasan dan isu perompak di perairan Indonesia. Sehingga, Indonesia mungkin belum mampu menawarkan kerja sama yang sama relevansinya dengan kebijakan BRI Tiongkok.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini melihat bahwa suatu negara dapat memetakan kepentingan nasionalnya lewat kondisi yang terjadi di kawasan maupun isu dan permasalahan yang ada di negara tersebut. Pemetaan kepentingan yang dilakukan Indonesia dalam hal ini untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan hasil dari analisa keadaan dan kondisi geopolitik yang berubah di kawasan Indo-Pasifik. Menariknya, pemetaan kepentingan Indonesia ini tidak hanya sampai pada keinginan untuk mengembangkan perekonomian nasional saja (*inward looking*), namun perubahan geopolitik ini juga turut mengubah pandangan Indonesia terhadap kebijakan luar negerinya (*outward looking*). Indonesia mulai memperluas cakupan cakupan nasionalnya menjadi regional dengan mengagas *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) ditengah masuknya aktor besar dalam kawasan Indo-Pasifik dan

berupaya menjaga sentralitas ASEAN di kawasan regional.

Adapun kepentingan Indonesia dalam meginsiasi AOIP adalah: 1) kepentingan ekonomi, hal ini dilihat dari keinginan Indonesia untuk membangun tol laut sebagai salah satu cara memenuhi kepentingan nasionalnya untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD. 2) kepentingan pertahanan, ekonomi dan pertahanan selalu berdampingan. Untuk membantu Indonesia meminimalisir ancaman yang terjadi di perairan Indonesia. 3) kepentingan tatanan dunia, di tengah perebutan kedua kekuatan besar yang sama sama menjadi negara yang bekerja sama diberbagai bidang dengan Indonesia membuat Indonesia memetakan kepentingan tatanan dunia untuk tetap menjaga posisi Indonesia di kawasan. Sejatinya, tujuan dari pembentukan AOIP oleh Indonesia itu sendiri adalah untuk melebarkan cakupan kepentingannya sehingga Indonesia dapat memiliki dukungan dan ruang yang lebih luas dalam menjalankan politik luar negerinya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agastia, I Gusti Bagus Dharma dan Perwita, Banyu. 'Jokowi's Maritim Axis Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific,' *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No.1, 2015, hal 33-41.
- Al Syahrin, Muhamad Najeri. 'Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia,' *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol. 3, No.1, 2018, hal 1-17.
- Anwar Fotuna, Dewi. 'Indonesia and The ASEAN Outlook om The Indo-Pacific,' *Jurnal International Affairs*, Vol. 96, No.1, 2020, hal 111-129.
- Bappenas. 'Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia: Triwulan I Tahun 2018,' *Jurnal Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas*, Vol.2, No.1, 2018, 1-145.
- CSIS. 'Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi,' *CSIS Working Paper*, Vol. 1, 2018, hal 1-36.
- Mohamad Yani, Yanyan dan Montratama, Ian. 'Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik,' *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 2, 2015, hal 25-51.
- Montratama, Ian. 'Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad ke-21,' *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1, No.1, 2016, hal 36-61.
- Neuchterlein, Donald E. 'National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Desicion-Making,' *Brit. J.International Studies*, Vol. 2, 1976, hal 246-266.
- Panduwinata, Yudistira. 'Pengawasan Wilayah Laut Selat Malaka Pada Kerjasama Malacca Strait Sea Patrols Tahun 2011 – 2013: Perspektif Indonesia,' *Journal of International Relations*, Vol 2, No. 4, 2016, hal 276-281.
- Roza, Rizky. 'Pandangan ASEAN Terhadap Indo-Pacific,' *Bidang Hubungan Internasional: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 11, No. 12, 2019, hal 7-12.

Scott, David. 'Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy,' *Journal of Current Southeast Asia Affairs*, 2019, hal 1-24.

Sukma, Rizal. 'Indonesia, ASEAN, and The Indo-Pacific: Strategic Necessity or Norm-Setting Exercise?,' *CSIS*, Vol. Lecture Series on Regional Dynamics, 2019, hal 1-7.

Situs

Antara News. (2018). *Membangun Kawasan melalui Konsep Indo-Pasifik Indonesia*. <https://www.antaraneews.com/berita/779616/membangun-kawasan-melalui-konsep-indo-pasifik-indonesia>. [Diakses pada November 2019];

CNN Indonesia. (2014). *Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas>. [Diakses pada Juni 2021];

CNN Indonesia. (2018). *Jokowi Perkenalkan Konsep Indo-Pacific di KTT ASEAN-India*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180126074522-113-271697/jokowi-perkenalkan-konsep-indo-pasifik-di-ktt-asean-india>. [Diakses pada November 2019];

Databoks Indonesia. (2016). *Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5 Pada 2016*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/04/pertumbuhan-ekonomi-asean-5-pada-2016>. [Diakses pada Juni 2021];

ITB. (2014). *Memiliki Empat Titik Strategis Indonesia Mampu Menjadi Poros Maritim Dunia*. <https://www.itb.ac.id/berita/detail/4550/memiliki-empat-titik-strategis-indonesia-mampu-menjadi-poros-maritim-dunia>. [Diakses pada April 2020];

